The Effectiveness of Bappeda's Role in Medan City Original Revenue Planning

by Jurnal Emak

Submission date: 10-Apr-2022 11:06AM (UTC-0700) Submission ID: 1806776369 File name: 30._Diah_Ayu_Agustin.doc (418K) Word count: 2275 Character count: 15316



PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah menurut UU 33 Tahun 2004 ialah pendapatan yang berasal dari pungutan yang dihasilkan oleh daerah sejalan dengan aturan daerah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan daerah ialah dengan mengoptimalkan efek dan Kontribusi berbagai sumber pendapatan daerah, antara lain pajak daerah,

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 APRIL 2022 page: 539 - 544 539

p-ISSN 2798-0499 e-ISSN 2798-0502

pajak daerah, bagi hasil BUMD, pendapatan pemerintah, dan pendapatan lainnya. Hasil yang diperoleh dari Pendapatan daerah dipakai dalam mewujudkan kepentingan masyarakat, antara lain: Membangun jalan, rumah sakit kota, jembatan, penciptaan lapangan kerja Baru.(Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016)

Pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan berhasil tidaknya pembangunan nasional terlihat dari pembangunan daerah. Begini bunyinya: "Memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan daerah mencerminkan pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah (Pemda) dan kotamadya mengelola potensi daerah dan mensejahterakan tingkat ekonomi. Diharapkan dapat menghadirkan lapangan kerja baru. Mengoptimalkan kemakmuran masyarakat atau warga, pemerintah daerah wajib bisa memanfaatkannya secara maksimal. Salah satu parameter keberhasilan pemerintah daerah ialah mengoptimalkan pendapatan daerah. (Yusmalina, Lasita, 2020)

Pemerintah daerah wajib dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), karena pemerintah daerah tidak hanya berkaitan pada pemerintah pusat. Hal ini Hal tersebut disebabkan pendapatan asli daerah ialah potensi yang besar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pendapatan dari daerah-daerah tasebut ialah: Mencakup pajak, pajak daerah, pendapatan dari manajemen aset daerah perseorangan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut pajak daerah, Jenis-jenis pajak yang terdapat pada Pajak Kota Medan ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak atas penyelenggaraan hiburan, Pajak Reklame, Pajak lampu jalan , Pajak Taman, Pajak Air Tanah, Pajak Perolehan Bumi/Bangunan dan Hak Adat. (Nugroho, 2021)

LANDASAN TEORI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ialah salah satu entitas sektor publik yang berperan untuk menyediakan dukungan terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Bappeda dibentuk menurut Perda No. 20 Tahun 2004. Terakhir menurut Perda No. 4 Tahun 2008 mengenai Penataan, Rangkaian Entitas dan Prosedur kinerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan PP. Tidak. 41 Tahun 2007 mengenai Entitas Perangkat Daerah. Hal ini mendorong Bappeda untuk mengubah struktur kelembagaannya, yang berkewajiban mendukung kinerja Badan Pimpinan dalam koordinasi perencanaan dan perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk perencanaan program untuk kegiatan (Abdul Halim, 2016)

Bappeda Kota Medan memiliki kedudukan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan di sektor perancanaan yang diketuai oleh seorang Kepala Badan, dan memiliki kedudukan dibawah serta berkewajiban kepada Walikota melalui sekretaris daerah. (Bappeda Kota Medan, 2022)

Menurut survei pendahuluan penulis di lapangan, penulis mendapatkan kesimpulan jika penerimaan PAD Kota Medan semakin menurun setiap tahunnya. Sehingga pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah diperlukan keterlibatan stakeholder yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Tanggung jawab bersama dan konsistensi dalam mengimplementasikan program pelatihan yang telah ditetapkan ialah kunci untuk meraih pengaturan pendapatan yang paling dapat dikelola dan dicapai. Bappeda Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang berkewajiban dalam penataan kapasitas perencanaan pendapatan daerah. efektivitas peran Bappeda dalam melaksanakan perumusan perencanaan daerah tentu saja berkurang dalam beberapa hal. (Ali, Jamaluddin, & Saleh, 2018)

Dengan demikian, untuk memaksimalkan perannya, Bappeda dikerahkan sejalan dengan kewajiban dan fungsi . Menurut Kepala Cabang Bappeda, diketahui salah satu kriteria penilaian efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pendapatan daerah yang bisa dinilai dari aspek kinerja fungsional Bappeda itu sendiri, di mana melaksanakan berbagai latihan mempengaruhi pengertian kesiapan yang berupa faktor penting dalam dan inisiasi pencapaian tujuan rencana pendapatan daerah mandiri di berbagai sektor. (Fadila, Khalijah, & Umar, 2018)

Bappeda memiliki peran dan keistimewaan yang sangat penting. Wajib ada cara yang tepat untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, dan wajib dilaksanakan secara berkesinambungan oleh semua pihak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kemampuan pendapatan pendapatan asli daerah khususnya pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah dapat tetap terjaga dan tumbuh. Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan otonomi daerah dan keluasan dengan mengoptimalkan PAD untuk meminimalisir ketergantungan pada keuangan pusat. Strategi utama yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah ialah melakukan perhitungan potensi penghasilan yang dimiliki daerah tersebut.(Nur Ainun, 2018)

Bappeda wajib tegas dalam memungut pajak daerah dari wajib pajak. Dengan implementasi pendapatan daerah, masyarakat juga akan merasakan dampaknya, seperti memperbaiki jalan yang rusak

540 | Diah Ayu Agustin, Sri Sudiarti; The Effectiveness of Bappeda's...



atau menciptakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.(Mahmudi, 2016) Perbaikan atau peningkatan sarana dan prasarana. Bappeda juga wajib transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sifat transparan ini membuat publik mengetahui jika pajak yang mereka bayarkan digunakan untuk tujuan yang diharapkan. Bangun atau perbaiki infrastruktur dan bantu komunitas berbagi fasilitas yang disediakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif yang menitikberatkan pada efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pendapatan asli daerah kota medan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah Kepala Bappeda dan objek penelitiannya ialah efektivitas peran Bappeda.

Metode Penghimpunan Data

Adapun metode penghimpunan data ialah (1) dokumentasi dan (2) wawancara. Dokumentasi dilaksanakan pada kepala Bappeda untuk mendapatkan data peran bappeda sementara wawancara dilaksanakan dengan menyediakan pertanyaan umum kepada Pimpinan Bappeda Kota Medan, Adapun metode penghimpunan data ialah (1) dokumentasi dan (2) wawancara. Dokumentasi dilaksanakan pada kepala Bappeda untuk mendapatkan data peran bappeda sementara wawancara dilaksanakan dengan menyediakan pertanyaan umum kepada Pimpinan Bappeda sementara wawancara dilaksanakan dengan menyediakan pertanyaan umum kepada Pimpinan Bappeda Kota Medan, selanjutnya pertanyaan secara langsung dan mengkhusus akan ditanyakan pada kepala Bappeda agar mendapat informasi terkait efektivitas peran Bappeda

Sumber Data

Data berasal dari Bappeda Kota Medan dan berjenis data sekunder. Data sekunder kuantitatif ialah data mengenai peran Bappeda Kota Medan. Sementara data sekunder kualitatif ialah referensi beberapa buku yang menyangkut dan sejalan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analisis secara kualitatif dilaksanakan dengan prosedur pengelolaan data yang dimulai dari :

1. Reduksi Data

Penulis merangkum poin-poin terpenting sebelum menitikberatkan pada esensi. Data yang direduksi menyediakan deskripsi yang jelass dan memudahkan peneliti untuk menghimpunlebih banyak data.
 Penyajian Data

- Setelah data direduksi, tahap berikutnya ialah menampilkan data. Tampilan data dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, diagram alir, dan lainnya.
- Verifikasi

Langkah terakhir ialah menyimpulkan dan memvalidasinya. Kesimpulan pertama yang diajukan masih tentatif dan akan berubah seiring ditemukannya fakta dilapangan guna memberikan dukungan pada tahap penghimpunan data selanjutnya.(Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak asli daerah atau PAD, didalamnya terdiri atas pajak daerah, retribusi serta lain-lain yang sah. Ketiga hal tersebut sangat memiliki dampak pada pendapatan asli daerah, menurut data yang penulis dapat dari Bappeda Kota Medan, pendapatan asli daerah tertinggi didapat dari pajak daerah. Berikut ialah data mengenai pendapatan daerah yang didapat dari laporan Bappeda Tahun 2019 hingga 2021 yang penulis tuangkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 APRIL 2022 page: 539 – 544 541

p-ISSN 2798-0499 e-ISSN 2798-0502

Tabel I. Pendapatan Asir Daeran Medan						
Tahun	Pendapatan Pajak Daerah	Pendapatan Retribusi Daerah	Lain-lain yang Sah	Total		
2019	5.819.360.434.191	36.614.846.458	286.223.515.505	6.142.198.796.154		
2020	5.434.682.028.854	27.463.301.150	184.928.931.083	5.647.074.261.087		
2021	1.700.190.181.500	18.735.046.246	63.195.871.186	1.782.121.098.932		

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Medan

Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel 1 dideskripsikan jika pendapatan asli daerah (PAD) Medan mencakup pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah serta lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2019 ialah sebesar 6.142.198.796.154, lebih lanjut pada tahun 2020 PAD Kota Medan sebesar 5.647.074.261.087, dan pada tahun 2021 PAD Kota Medan hanya sebesar 1.782.121.098.932.

Dari hasil yang dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan jika setiap tahunnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan semakin menurun. Untuk lebih jelasnya, penulis telah menyajikan hasil wawancara kepada kepala Bappeda Kota Medan pada tabel berikut:

Tabel 2. Efektivitas Peran Bappeda Kota Medan					
Indikator	Keterangan	Hasil			
Kualitas dokumen perencanaan dan pembangunan melalui	Penyusunan dokumen perencanaan	Baik, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan, peran bappeda sudah cukup baik dan terbilang gesit dan cepat			
penguatan koordinasi antar sektor pembangunan	Pentahapan proses perencanaan dan penganggaran	Kurang baik, dalam proses perencanaan dan penganggaran masih terbilang lamban, sehingga diperlukan adanya pelatihan kembali kepada para pekerja agar lebih mengerti dan memahami apa yang wajib dikerjakan, sehingga bisa meminimalisir tingkat kesalahan			
	Koordinasi, sinkronisasi dan fungsi pengendalian dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan	Kurang baik, dikarenakan masih banyaknya kesalahpahaman disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar divisi bagian.			
Kualitas pengukuran indikator kinerja	Ketepatan indikator kinerja	Baik, dibuktikan dengan adanya pemberlakuan peraturan atau prosedur mengenai kinerja pada Bappeda Kota Medan			
	Pemutakhiran data yang cepat, tepat dan akurat	Kurang baik, dikarenakan data yang diserahkan terkadang masih banyak yang belum lengkap dan salah perhitungan			
	Monitoring dan evaluasi secara bertahap	Cukup baik, karena adanya evaluasi per 3 bulan sekali			
	Pelaporan capaian kinerja	Baik, dibuktikan dengan adanya laporan capaian kinerja secara triwulam			

Tabel 2. Efektivitas Peran Bappeda Kota Medan

Hal ini menunjukkan jika Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Medan perlu memaksimalisasi dan mengoptimalisasikan perannya sehingga pendapatan asli daerah tidak terus-terusan

542 | Diah Ayu Agustin, Sri Sudiarti; The Effectiveness of Bappeda's...

menurun. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan menciptakan serta menerapkan strategi-strategi terbaru dalam mengatasi hal tersebut.

JURNAL EMAH

Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan

Adapun strategi-strategi tersebut ialah:

Penerbit ADM

- 1. Strategi 1 : peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pembangunan melalui penguatan koordinasi antar sektor pembangunan. Cara yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan strategi tersebut ialah dengan menentukan arah kebijakan, yakni :
 - a. Peningkatan efektivitas dalam penyusunan dokumen perencanaan sejalan dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
 - b. Mengoptimalkan efektivitas dalam pentahapan proses perencanaan dan penganggaran
 - c. Mengoptimalkan koordinasi, sinkronisasi dan fungsi pengendalian dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan
- 2. Stretegi 2 : peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja cara yang akan dilaksanakan dalam Mewujudkan strategi tersebut ialah dengan menentukan arah kebijakan yakni
 - a. Mengoptimalkan ketepatan indikator kinerja sebagai dukungan ketercapaian program dan kegiatan.
 - b. Pemutakhiran data yang cepat, tepat dan akurat sebagai dukungan capaian indikator kerja.
 - c. Mengoptimalkan efektivitas monitoring dan evaluasi secara bertahap terhadap capaian indikator kineria
 - d. Mengoptimalkan kualitas pelaporan capaian kinerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini ialah dalam menjalankan perannya dalam hal perencanaan peningkatan pajak asli daerah (PAD) Kota Medan masih belum sepenuhnya efektif, sehingga perlu adanya langkah atau strategi yang wajib dilaksanakan oleh Bappeda Kota Medan seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pembangunan melalui penguatan koordinasi antar sektor pembangunan serta peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja. Hal tersebut juga didukung dengan penggalian potensi lapangan, penyuluhan mengenai wajib pajak, melaksanakan pendataan ulang serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Adapun masukan untuk kedepannya agar dapat menambah variable penelitian mampu untuk mempelajari Efektivitas peran Bappeda. Penelitian ini perlu dimutakhirkan dengan data yang lebih akurat untuk menguji variabel lain yang diduga kuat mempengaruhi peran Bapada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. (2016). *Manajemen Keuangan Derah* (Revisi).

- Ali, N. S., Jamaluddin, J., & Saleh, S. (2018). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar.
- Bappeda Kota Medan. (2022). *Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021*. Bappeda Kota Medan.
- Fadila, O. A., Khalijah, S., & Umar, T. (2018). Efektivitas efektivitas peran Bappeda dalam pembangunan kota medan, 133–144.

Lakoy, T. W., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014), 16(01), 559–567.

Mahmudi. (2016). Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nugroho, I. R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur.

Nur Ainun. (2018). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016. Institut agama islam negeri.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitiar<mark>i, k</mark>ualitatif dan Pembelajaran. Alfabeta* (Vol. 1). Bandung: Alfabeta. Yusmalina, Lasita, F. H. (2020). <mark>Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap</mark>

Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018, 1(1), 13–21.

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan, Vol. 3 No. 2 APRIL 2022 page: 539 - 544 543

p-ISSN 2798-0499 e-ISSN 2798-0502

544 | Diah Ayu Agustin, Sri Sudiarti; The Effectiveness of Bappeda's...

The Effectiveness of Bappeda's Role in Medan City Original Revenue Planning

ORIGINALITY REPORT

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED) 9%	
★ 123dok.com	
Internet Source	

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

The Effectiveness of Bappeda's Role in Medan City Original Revenue Planning

GRADEMARK REPORT	
FINAL GRADE	GENERAL COMMENTS
/0	Instructor
PAGE 1	
PAGE 2	
PAGE 3	
PAGE 4	
PAGE 5	
PAGE 6	